

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdullillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena curahan nikmat dan rahmat-Nya pada kita semua, saat ini kita masih dapat terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kota Padang Panjang yang kita cintai ini, dengan kasih sayang-Nya pula kita dapat menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan pada Perangkat Daerah ini, yakni Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

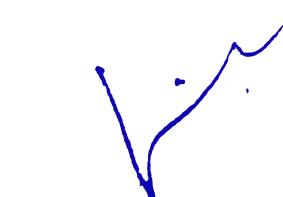
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kota Padang Panjang. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kota Padang Panjang dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik antara lain efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan Kualitas dan kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Padang Panjang, 2019

Kepala Dinas,


I PUTU VENDA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda
Nip.19770522 199511 1 001

D A F T A R I S I

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iii
Bab I : Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	27
Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota atau Renstra Propinsi	31
3.4 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	32
BAB IV : Tujuan dan Sasaran	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	34
BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan	36
BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	38
BAB VII : Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan	43
BAB VIII : Penutup	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat	9
Tabel 2.2	Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	9
Tabel 2.3	Data Tenaga Ahli Transportasi Darat dan kebutuhan pada Dinas Perhubungan	10
Tabel 2.4	Data ASN Dinas Perhubungan Berdasarkan Kompetensi Sertifikasi	10
Tabel 2.5	Data Tenaga Harian Lepas/Honorar pada Dinas Perhubungan	11
Tabel 2.6	Kondisi Asset Dinas Perhubungan	12
Tabel 2.7	Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	13
Tabel 2.8	Data Lokasi Warning Light dan Kondisi	13
Tabel 2.9	Data Lokasi Traffic Light dan Kondisi	14
Tabel 2.10	Data Lokasi Cermin Tikung dan Kondisi	15
Tabel 2.11	Data Lokasi Halte dan Kondisi	16
Tabel 2.12	Data Lokasi Pemasangan Guadral dan Kondisi	17
Tabel 2.13	Data Angkutan Darat dan Jumlah Penumpang	18
Tabel 2.14	Data Pelayanan Izin Trayek	18
Tabel 2.15	Data Jumlah Kendaraan Wajib Uji	19
Tabel 2.16	Data Sarana Alat Uji Kendaraan Bermotor	20
Tabel 2.17	Data Terminal Kota Padang Panjang	20
Tabel 2.18	Data Lokasi Parkir Kota Padang Panjang	21
Tabel 2.19	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	22
Tabel 2.20	Anggaran dan Realisasi Pendanaan	24
Tabel 3.1	Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28
Tabel 3.2	Telaahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
Tabel 3.3	Komparasi Visi dan Misi Renstra Kota terhadap Visi Misi Renstra Propinsi atau Renstra K/L	31
Tabel 3.4	Telaahan Terhadap RTRW dan KLHS Kota Padang Panjang	32
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	34
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	36
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan	39
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Susunan Organisasi Dinas Perhubungan	8
------------	--------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengacu pula pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, evaluasi tata cara rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja perangkat daerah pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan masalah urusan perhubungan yang ada di Kota Padang Panjang. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari evaluasi pembangunan sektor perhubungan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun 5 (lima) tahun kedepan sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Dalam periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2018 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang telah berupaya menjalankan tugas dan fungsi dalam meningkatkan infrastruktur Kota disektor perhubungan baik peningkatan pelayanan angkutan yang aman dan nyaman serta peningkatan sarana prasana lalu lintas.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 diharapkan dapat menjadi jawaban konkret terhadap terwujudnya kualitas lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan secara bertahap dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta diimplementasikan guna mendukung tercapainya visi dan Misi Pemerintah Kota Padang Panjang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023 ini disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manjemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pengemudi di Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Padang Panjang ;
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2018-2023 yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan harmonis dan berkesinambungan.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis adalah :

1. Sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun;
2. Sebagai penjabaran sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD 2018-2023;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dibidang perhubungan, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi, terdiri dari;
 - a. Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional;
 - b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Seksi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi.
4. Bidang Angkutan Jalan dan Perpaketan, terdiri dari;
 - a. Seksi Angkutan;
 - b. Seksi Pendataan dan Pengendalian;
 - c. Seksi Terminal dan Perpaketan.
5. UPTD; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atas sesuai tugas dan fungsinya.

2. **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan program administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan urusan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana serta Kehumasan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
- b. **Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perhubungan.

3. Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang lalu lintas dan akreditasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bimbingan keselamatan, pengendalian lalu lintas dan operasional;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program manajemen rekayasa lalu lintas;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana lalu lintas dan akreditasi;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi terdiri dari :

- a. **Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional**, mempunyai tugas menyelenggarakan program bimbingan keselamatan dan pengendalian lalu lintas dalam arti melaksanakan perencanaan, bimbingan keselamatan bagi pengendara kendaraan, pengguna jalan, pengaturan di bidang lalu lintas, secara teknis, analisis daerah rawan kecelakaan dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang di jalan, penetapan kecepatan maksimal kendaraan dan larangan menggunakan jalan.
- b. **Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- c. **Seksi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi**, mempunyai tugas menyelenggarakan program sarana prasarana lalu lintas dalam arti merencanakan, menyiapkan serta melakukan pengadaan seluruh sarana prasarana lalu lintas, serta menyelenggarakan program akreditasi dalam arti merencanakan, menyiapkan bahan pengendalian kelaikan kendaraan bermotor, melakukan pemantauan bimbingan teknis dan operasional, analisis penilaian terhadap pengoperasian kendaraan bermotor dan melakukan evaluasi hasil kelaikan kendaraan.

4. Bidang Angkutan dan Perpakiran, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang angkutan dan perpakiran.

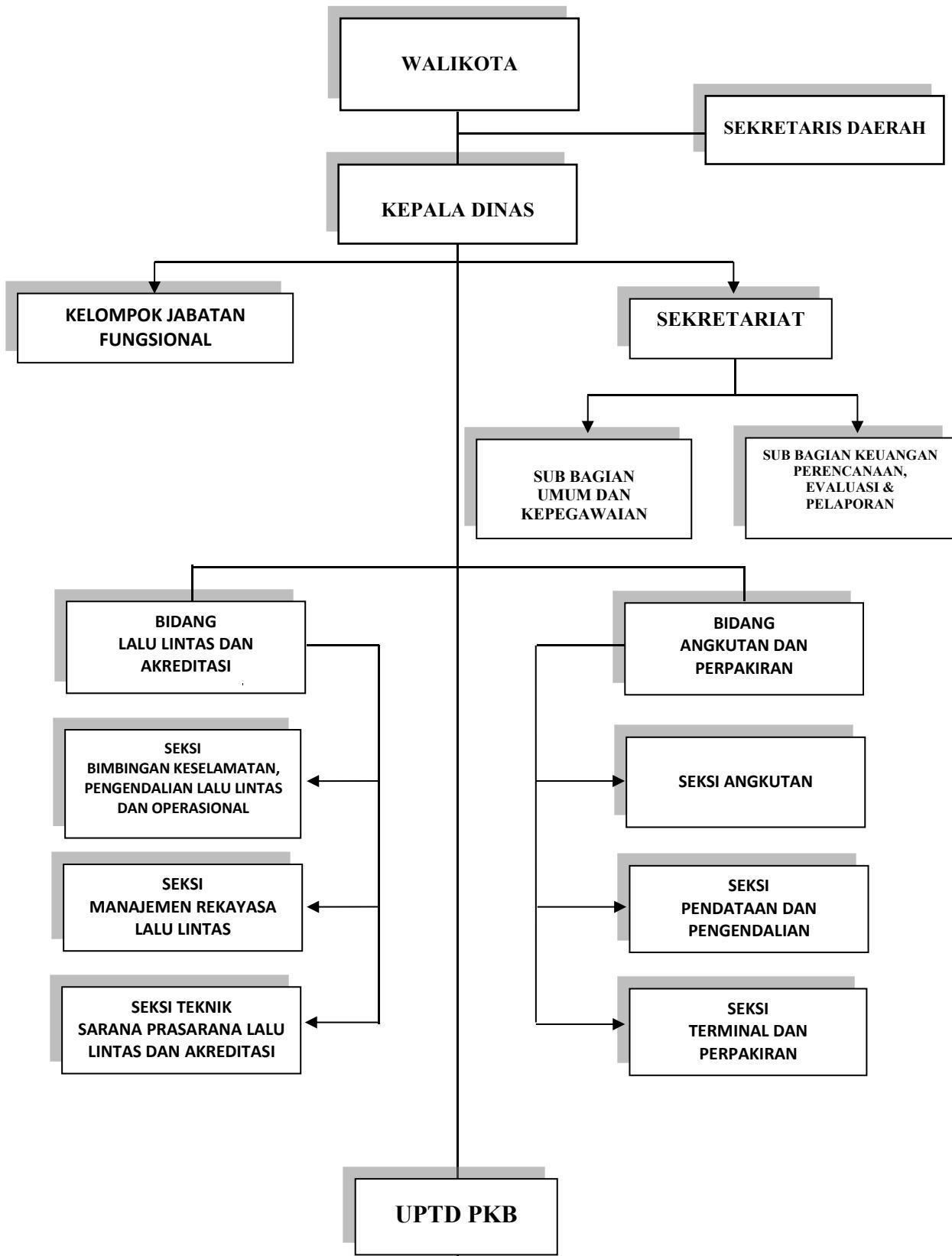
Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang angkutan dan perpakiran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang angkutan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendataan dan pengendalian;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang terminal dan perparkiran;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang angkutan dan perparkiran terdiri dari :

- a. **Seksi Angkutan**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi angkutan.
 - b. **Seksi Pendataan dan Pengendalian**, mempunyai tugas menyelenggarakan program pendataan terhadap semua yang ada pada Dinas Perhubungan, serta mengendalikan pengelolaan angkutan dalam arti melakukan pembinaan, pengawasan, dan memproses pemberian perizinan terhadap penyelenggaraan angkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. **Seksi Terminal dan Perparkiran**, mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan terminal dan perparkiran dalam arti merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penggunaan terminal dan tempat parkir, memproses kegiatan pengadaan, penetapan, pemasangan dan pembangunan serta pemeliharaan sarana terminal dan perparkiran.
5. **UPTD** pada Dinas Perhubungan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
 - b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

6. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang menurut golongan ruang/kepangkatan dan jenis kelamin keadaan 2018 pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat
Tahun 2018

Unit Kerja	Jenis Kelamin			Golongan			Jumlah
	Pria	Wanita	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	
Kepala	1						1
Sekretariat	10	3		5	7	1	13
Bid. Lalu Lintas	18	1		10	7	2	19
Bid. Angkutan	17			10	7		17
UPTD PKB	5	1		2	4		6
Jumlah	51	5		27	25	3	56

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2018

Pada dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Jumlah ASN Wanita masih kurang dari jumlah seharusnya yang dibutuhkan sehingga saat ini hanya 9% ASN Wanita dari keseluruhan ASN Dinas Perhubungan, sehingga untuk kedepan perlu penambahan ASN wanita sesuai kebutuhannya dan pemenuhan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah.

Berdasarkan kualitas dan tanggungjawab kerja, SDM Dinas Perhubungan dibedakan menurut basis pendidikan dan unit kerjanya terinci pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2018

Unit Kerja	SD-SLTP	SLTA	D2 - D3		S1	S2	Jumlah
			D2	D3			
Kepala							1
Sekretariat	1	5	2	5	-	-	13
Bid. Lalu Lintas	2	11	-	6	-	-	19
Bid. Angkutan	1	10	2	4	-	-	17
UPTD PKB	-	3	2	1	-	-	6
Jumlah	4	29	6	16	1	1	56

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2018

Secara riil jumlah pegawai Dinas Perhubungan masih belum memadai menurut hasil analisa jabatan, formasi yang ada sebanyak 56 orang ASN.

Sejalan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia Perhubungan telah melaksanakan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang khusus berkualifikasi dibidang perhubungan dengan mengirimkan selama 5 (lima) tahun dan dapat menjangkau tenaga teknis ahli transportasi seperti tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Data Tenaga Ahli Transportasi Darat
Kebutuhan pada Dinas Perhubungan

Jurusan	Kondisi Riil	Jumlah Ideal	Kurang
D.IV Transportasi Darat	2	6	4
D.III Ahli LLAJ	-	12	12
D.III Perkeretaapian	-	2	2
D.II PKB	-	8	8
Jumlah	2	28	26

Sumber : Dinas Perhubungan, 2018

Sejalan dengan hal tersebut diatas perkembangan ASN Dinas Perhubungan selain melalui pendidikan formal dapat ditunjang dengan mengikuti pendidikan /pelatihan yang dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan. Adapun data ASN Dinas Perhubungan yang mempunyai kompetensi yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan sebagai berikut pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Data ASN Dinas Perhubungan berdasarkan
Kompetensi Sertifikasi

No	Jenis Kompetensi	Kompetensi	Sertifikasi
1	Penguji	4	
2	PPNS	2	
3	Penilai Andalalin	3	
4	Pengelolaan Terminal	-	
5	Manajemen Angkutan Umum	1	
6	Manajemen Sarana Prasarana	-	-
7	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	-	2
8	Administrasi PKB	-	2
9	Orientasi Lalu Lintas		4
10	Diklat Traffict Light		4
	Jumlah	10	12

Sumber : Dinas Perhubungan, 2018

Dari tabel diatas menyajikan sebagian dari diklat teknis yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan yang pernah diikuti oleh ASN Dinas Perhubungan Padang Panjang untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur Perhubungan.

Guna meningkatkan layanan khusus formasi yang tidak dapat diisi oleh ASN dan ketugasannya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat perhubungan, melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk terfasilitasinya operasional kantor dan lapangan maka Dinas Perhubungan mengangkat Tenaga Harian Lepas. Berdasarkan ketugasannya Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perhubungan disajikan pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Data Tenaga Harian Lepas/Non ASN pada Dinas Perhubungan
Tahun 2018

Unit Kerja	Ketugasannya	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
Sekretariat	Sopir	3	-	3
	Pengaja Malam	1	-	1
	Tenaga kebersihan	4	1	5
Bidang Lalu Lintas	Tenaga Operasional Lapangan	2	8	10
Bidang Angkutan	Petugas TPR	2	-	2
	Pemungut Retribusi Parkir	8	-	8
UPTD PKB	Penjaga malam	1	-	1
	Petugas Kebersihan	1	-	1
	Jumlah	22	9	31

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2018

Kebutuhan tenaga harian lepas pada Dinas Perhubungan masih kurang, khususnya tenaga operasional lapangan baik dalam pengendalian dan pengamanan lalu lintas serta penertiban maupun pemungutan retribusi parkir, hal ini disebabkan banyaknya lokasi yang rawan terjadi kecelakaan dan kemacetan lalulintas serta pengembangan kawasan pasar yang mengakibatkan penambahan lokasi parkir.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pada umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan mendukung pelayanan perkantoran dan lapangan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6
Kondisi Asset Dinas Perhubungan
Tahun 2018

Nama/Jenis barang	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Gedung	2	2	-	-
Kendaraan Roda 4	4	3	1	-
Kendaraan Roda 2	9	9	-	-
Kendaraan Roda 6	2	2	-	-
Mesin Gerinda Tangan	2	1	-	1
Mesin Bor Tangan	2	1	-	1
Generator Set	1	1	-	-
Generator Set PKB	1	1	-	-
Kompresor & Speed Set	1	1	-	-
Kompresor PKB	2	2	-	-
Peralatan Pengujian PKB	12	12	-	-
Teropong	1	1	-	-
HT	22	8	-	14
Alat Pemadam	7	7	-	-
Mesin Absensi	1	1	-	-
Komputer	15	14	-	1
Note Book	13	11	1	1
LCD	3	3	-	-
Printer	16	14	-	2
Repiter	1	1	-	-
Kamera	4	3	-	1

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2018

Secara keseluruhan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan dalam kondisi baik, untuk menunjang fasilitas dan kelancaran operasional dikantor serta dilapangan akan terus dilakukan peningkatan dengan melakukan pengadaan maupun pemeliharaan, adapun aset yang rusak berat sudah dalam usulan penghapusan.

Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan baik posisi di jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kota dari tahun 2013 -2018 dapat dilihat pada tabel 2.7

Tabel 2.7
Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Tahun 2013-2018

No	Prasarana dan fasilitas	Jumlah pada tahun						Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Warning Light	16	19	19	19	19	25	Unit
2	Traffic Light	6	7	7	7	7	7	Unit
3	Rambu-Rambu	446	509	565	580	625	675	Buah
4	Cermin Tikung	15	19	23	23	28	28	Buah
5	Halte	14	18	21	21	21	21	Unit
6	Pagar Pengaman	703	820	820	872	872	996	Meter

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2018

Prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan dari tahun 2013 sampai dengan 2018 terdapat peningkatan sesuai dengan kebutuhan dan akan terus dilakukan pengembangan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar dan selamat.

Warning Light adalah rambu bersuar yang berfungsi sebagai pemberi peringatan kepada pengguna kendaraan maupun pejalan kaki yang melalui jalan tersebut agar berhati-hati. Warning light dipasang pada daerah rawan kecelakaan seperti penurunan/pendakian, persimpangan. Data pemasangan warning light di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Data Lokasi Warning Light dan Kondisi

No	Ruas	Lokasi	Kondisi
1	St. Syahrir	Depan Inspektorat	Baik
2	M. Yamin	Sebelum Simp. Bkd	Baik
3	M. Yamin	Sesudah Simp. Bkd	Baik
4	Soekarno Hatta	Depan Yarsi	Baik
5	Soekarno Hatta	Dekat Bak Air	Mati
6	Simp. Mtsn	Sebelum Mtsn	Baik
7	Simp. Mtsn	Sesudah Mtsn	Baik
8	Rsud	Sebelum Rsud	Rusak Berat
9	Rsud	Sesudah Rsud	Rusak Berat
10	Simp. Andaleh	Sebelum Simpang Andaleh	Rusak Berat
11	Simp. Andaleh	Sesudah Simpang Andaleh	Rusak Berat
12	A. Yani	Simp. Kacang Kayu	Baik
13	A. Yani	Simpang Ekor Lubuk	Rusak Berat
14	A. Yani	Simpang Monas	Baik
15	A. Yani	Ngalau	Baik
16	Agussalim	Sebelum Simpang Tanjung	Baik
17	Agussalim	Sesudah Simpang Tanjung	Baik
18	Tanjung	Arah Ke Tanjung	Mati
19	Tanjung	Simpang	Baik
20	A. Yani	SMPN 3	Baik
21	A. Yani	SMPN 3	Baik
22	By Pass Kacang Kayu	Kacang Kayu	Baik
23	By Pass Kacang Kayu	Kacang Kayu	Baik
24	Ahmad Dahlan	SMAN 1 Pd. Panjang	Baik
25	Ahmad Dahlan	SMAN 1 Pd. Panjang	Baik

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2018

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan ada beberapa warning light yang perlu diremajakan karena dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi. Sementara untuk mempertahankan agar warning light dengan baik dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi.

Traffic Light adalah rambu bersuar yang berfungsi mengatur arus lalu lintas dipersimpangan menggunakan peringatan melalui 3 warna sehingga arus lalu lintas dapat terkendali secara otomatis. Data pemasangan traffic light di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.9

Tabel 2.9
Data Lokasi Traffict Light dan Kondisi

No	Nama Simpang	Jumlah Simpang	Kondisi
1	Simpang Padang	3	Baik
2	Simpang PDAM	3	Baik
3	Simpang Lbk. Mata Kucing	4	Rusak Ringan
4	Simpang SMP 1	4	Rusak Berat
5	Simpang Hasiba	4	Baik
6	Simpang Ganting	4	Rusak Berat
7	Simpang 8	8	Mati

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2018

Pada beberapa persimpangan penggunaan traffict light sebagai pengaturan lalu lintas secara teknis tidak memenuhi kriteria lagi seperti simpang 8 dan simpang SMP 1, sementara dipersimpangan lainnya masih terdapat kebutuhan pemasangan traffic light.

Cermin tikung merupakan salah satu fasilitas keselamatan lalu lintas yang berfungsi membantu pengguna jalan pada lokasi yang jarak pandangnya tidak luas sehingga rawan kecelakaan lalu lintas, untuk Kota Padang Panjang cermin tikung telah dipasang pada lokasi seperti tabel 2.10

Tabel 2.10
Data Lokasi Cermin Tikung dan Kondisi

No	Wilayah	Lokasi	Kondisi
1	Daud Rasidi	Kp. Baru	Baik
2	Daud Rasidi	Gg Suka Maju	Rusak
3	Pdg Panjang – Padang	Bukit Berbunga	Baik
4	Pdg Panjang – Padang	Kelok Sukma	Baik
5	Kp. Teleng	Pangkalan Ojek	Baik
6	Agussalim	Seroja	Baik
7	Agussalim	Tikungan DPRD	Baik
8	Blkg Smp	Mesjid Nurul Amri	Baik
9	Kamarullah	Dekat Mtsn	Baik
10	Tanjung	Dekat Persawahan	Baik
11	Tanjung	Pendakian Simp. Tanjung	Baik
12	Rsud - Kacang Kayu	Kelok Tahu	Baik
13	Rsud - Kacang Kayu	Simp. Solok Batuang Ateh	Baik
14	Rsud - Kacang Kayu	Depan Smu Unggul	Baik
15	A. Yani	Jembatan Ngalau	Baik
16	Sei Andok	Kub. Cino	Baik
17	Lingkar Selatan	Simp. 3 Arah. Kp. Manggih	Baik
18	Lingkar Selatan	Simp. 3 Arah. Sei Andok	Baik
19	Arah Mifan	Sebelum Mifan	Baik
20	Sigando	Dekat SD 06	Baik
21	Sigando	Sesudah SD 06	Baik
22	Sigando	Sebelum Mesjid Assasi	Baik
23	Koto Panjang	Simpang Kolor	Baik
24	Kantor Camat Timur	Sesudah Camat Timur	Baik
25	Kantor Camat Timur	Sesudah Camat Timur	Baik
26	Guguk Malintang	Dibawah Kantor Lurah (Mushola Amanah)	Baik
27	Guguk Malintang	Simpang Tiga Mesjid Tanah Bato	Baik
28	Padang Reno	Perumahan Padang Reno	Baik

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2018

Secara keseluruhan kondisi cermin tikung yang terpasang dalam keadaan baik, namun perlu pemeliharaan secara rutin pada kaca cermin. Sementara kebutuhan pemasangannya pada lokasi-lokasi rawan masih banyak dan perlu ditindaklanjuti.

Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikan penumpang. Keberadaan halte sebagai tempat menunggu kendaraan umum sangat diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa angkutan umum.

Halte yang terpasang sebanyak 24 unit diantaranya 3 unit bukan aset daerah Kota Padang Panjang dan data Halte disajikan pada tabel 2.11

Tabel 2.11
Data Lokasi Halte dan Kondisinya

No	Nama Halte	Lokasi	Kondisi
1	Halte simpang Perumnas	Jl. ST. Syahrir	Baik
2	Halte Rest Area	Jl. ST. Syahrir	Baik
3	Halte SDN 12	Jl. ST. Syahrir	Baik
4	Halte Simpang PDIKM	Jl. ST. Syahrir	Baik
5	Halte Depan Balaikota	Jl. ST. Syahrir	Baik
6	Halte Depan Brimob	Jl. ST. Syahrir	Baik
7	Halte Simpang SMP 1	Jl. Sudirman	Baik
8	Halte SMA Muhammadiyah	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Baik
9	Halte SMA 1	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Baik
10	Halte Simpang Koto	Jl. A. Yani	Baik
11	Halte KLK	Jl. A. Yani	Baik
12	Halte Simpang Monas	Jl. A. Yani	Baik
13	Halte SMP 3	Jl. A. Yani	Baik
14	Halte Simpang Guguk Kaliliang	Jl. A. Yani	Baik
15	Halte Simpang Ransam	Jl. A. Yani	Baik
16	Halte Simpang Kacang Kayu	Jl. A. Yani	Baik
17	Halte Solok Batuang	Bypass	Baik
18	Halte SMA Unggul	Bypass	Baik
19	Halte Simpang Gantiang	Bypass	Baik
20	Halte RSUD	Bypass	Baik
21	Halte Simpang Bukit Kanduang	Bypass	Baik
22	Halte Thawalib	Jl. Dr. Hamka	Baik
23	Halte Pertiwi	Jl. Soekarno Hatta	Baik
24	Halte SMK 2	Sigando	Baik

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2018

Secara keseluruhan halte yang ada wilayah Kota Padang Panjang dalam kondisi baik, prasarana ini terus dilakukan pemeliharaan untuk kenyamanan masyarakat yang menggunakannya. Untuk kebutuhan kedepannya perlu penambahan halte lokasi kantong-kantong penumpang pengguna angkutan umum

Pagar Pengaman atau guardrail adalah sarana lalu lintas yang bermanfaat untuk melindungi kendaraan maupun pejalan kaki yang melalui daerah terjal/jurang yang rawan kecelakaan. Adapun data pemasangan guardrail di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.12

Tabel 2.12
Data Lokasi Pemasangan Guadral dan Kondisi

No	Ruas Jalan	Posisi		Kondisi		Panjang (M)	Keterangan
		Kiri	Kanan	Rusak Kiri	Rusak Kanan		
1	By Pass (Dekat Pabrik Tahu)	76	76			152	
2	By Pass (Simpang Bukit Kandung)	56	48			104	
3	By Pass (Sebelum RSUD)		172			172	
4	By Pass (Solok Batung)	80	72	4	4	160	Dibuka Untuk Akses Jalan
5	Sesudah Camat Timur	88	52			140	
6	Simpang DPRD		28		4	32	Hilang / Dibuka
7	Bukit Berbunga (Arah Batas Kota)	72				72	
8	Jembatan Kamba Batas Kota	44		16		60	Hilang / Dibuka
9	Jembatan Putih (Arah Mifan)		72			72	
10	Sei Andok (Dari Tn. Hitam)		32			32	

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2018

Pagar pengaman yang terpasang secara keseluruhan dalam kondisi baik, ada beberapa yang hilang atau dibuka karena pembukaan akses jalan namun karena faktor wilayah Padang panjang yang berbukit maka pemasangan pagar pengaman masih dilakukan.

Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk melayani mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Kondisi pelayanan transportasi belum optimal, disebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan kinerja angkutan umum yang rendah.

Jumlah penumpang angkutan umum terus mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai 2018. Kondisi ini pun berdampak pada lesunya usaha angkutan umum di Kota Padang Panjang. Data penurunan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.13

Tabel 2.13
Data Angkutan Darat dan Jumlah Penumpang

Tahun	Jumlah Angkutan Darat	Jumlah Penumpang
2013	115	753.535
2014	115	694.875
2015	112	637.500
2016	112	580.125
2017	110	567.000
2018	110	580.500

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya jumlah angkutan darat dari tahun 2013 terus menurun berbanding lurus dengan jumlah penumpang. Hal ini menyebabkan terus meningkatnya jumlah pengguna angkutan pribadi maupun penggunaan angkutan pribadi menjadi angkutan umum non formal. Hal ini perlu disikapi oleh Pemerintah Daerah agar ketersediaan angkutan umum dapat terpenuhi dengan transportasi layak.

Pelayanan Izin trayek angkutan darat yang ada di Kota Padang Panjang cenderung menurun dikarenakan pemeliharaan terhadap angkutan umum tersebut tidak lagi optimal. Data pelayanan angkutan umum yang tercatat hingga tahun 2018 sebanyak 110 unit yang melakukan izin trayek dapat dilihat pada tabel 2.14

Tabel 2.14
Data Pelayanan Izin Trayek

Tahun	Izin Trayek	Jumlah Angkutan Darat
2013	95 Unit	115
2014	93 Unit	115
2015	82 Unit	112
2016	85 Unit	112
2017	75 Unit	110
2018	70 Unit	110

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, 2018

Angka pengurusan izin trayek dari tahun 2013 hingga 2018 terus menurun hal ini disebabkan rendahnya kesadaran pengguna angkutan untuk melakukan izin trayek disamping lesunya masyarakat menggunakan angkutan kota.

Guna memberikan jaminan keselamatan secara teknis dijalan setiap kendaraan wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

memiliki 1 unit pengujian kendaraan bermotor. Berikut kami sajikan data perkembangan kendaraan wajib uji tahun 2013 – 2018 seperti tabel 2.15

Tabel 2.15
Data Jumlah Kendaraan Wajib Uji

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Jumlah Kendaraan Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Mini Bus	Unit	274	259	245	245	267	255
2	Bus	Unit	64	68	85	99	118	142
3	Mobil Penumpang Umum	Unit	51	41	38	38	40	31
4	Pick Up	Unit	733	772	812	796	791	812
5	Tangki	Unit	80	46	39	31	26	9
6	Truck	Unit	587	586	580	591	663	832
7	Dump Truck	Unit	48	77	88	95	96	24
8	Box	Unit	81	78	91	114	129	22
9	Mobil Derek	Unit	-	-	-	2	1	2

Sumber : UPTD PKB Dinas Perhubungan, 2018

Kendaraan yang melakukan wajib uji di UPTD PKB Dinas perhubungan tidak selalu menunjukkan kenaikan angka hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain seperti kendaraan melakukan numpang uji di daerah lain, tidak lolos uji atau tidak melakukan keur.

Untuk mendukung kegiatan pengujian kendaraan bermotor di Kota Padang Panjang, maka Dinas Perhubungan berupaya memenuhi fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor guna memeriksa persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan tersebut. Adapun alat-alat yang digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor pada UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.16

Tabel 2.16
Data Sarana Alat Uji Kendaraan Bermotor

No	Nama Alat	Tahun pembelian	Kondisi
1	Genset (Kapasitas 70 Kvolt)	2011	Baik
2	Kompressor	2011	Baik
3	Brake Tester	2011	Baik
4	Speedometer Tester	2012	Baik
5	Side Slip Tester	2012	Baik

6	Headlight Tester	2013	Baik
7	Axle Play Detector	2013	Baik
8	Gas Analyzer	2013	Baik
9	Sound Level Tester	2013	Baik
10	Diesel Smoke Tester	2009	Rusak
11	Tint Meter Inspector	2012	Baik
12	Pengukuran Kedalaman Alur Ban	2015	Baik
13	Diesel Smoke Tester	2018	Baik

Sumber : UPTD PKB Dinas Perhubungan, 2018

Alat-alat pengujian kendaraan bermotor secara keseluruhan dalam kondisi baik, hal ini perlu ditunjang secara rutin dengan melakukan rehabilitasi dan kalibrasi secara berkala.

Wilayah Kota Padang Panjang yang luasnya hanya 23 Km² dengan panjang jalan 105,46 Km yang dibagi menjadi 2 kecamatan dan 16 kelurahan, menjadikan kota kecil ini hanya memiliki 1 terminal angkutan kota atau disebut Terminal Tipe C, meski dari tahun 2013-2016 juga memiliki terminal tipe B untuk kelas angkutan bus antar propinsi, namun terminal ini pada tahun 2016 telah diambil alih oleh Propinsi Sumatera Barat. Berikut perkembangan terminal di Kota Padang Panjang dari 2013-2018 pada tabel 2.17

Tabel. 2.17
Data Terminal Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018

Jenis Terminal	Jumlah Terminal Tahun						Luas
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Terminal C	1	1	1	1	1	1	1,1 m ²
Terminal B	1	1	1	-	-	-	2,1 m ²

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, 2018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan terminal tipe B Bukit Surungan menjadi kewenangan Propinsi sementara terminal tipe C untuk angkutan umum kota belum berfungsi dengan optimal karena dialih fungsikan untuk pasar penampungan serta status lahan terminal tipe C yang tidak sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

Parkir merupakan fasilitas yang digunakan oleh kendaraan umum untuk berhenti dengan durasi waktu yang lama, untuk Kota Padang panjang melalui Perda ditetapkan lokasi parkir untuk kelancaran dan ketertiban lalu lintas sesuai dengan tabel 2.18

Tabel 2.18
Data Lokasi Parkir di Kota Padang Panjang

No	Lokasi Parkir	Peruntukan	Ukuran Luas (M ²)	Luas Terpakai (M ²)
1	Jl.Adinegor (gang Kecap) bekakang Kantor Pengelola Pasar	Roda 4 dan 6	20 M	20M
2	Jl.Abdul Muis.	Roda 2	40 M	32 M
3	Jl.Abdul Muis.	Roda 2	40M	33 M
4	Jl.Abdul Muis.	Roda 2	40M	34 M
5	Gedung Moh,Syafe'i	Roda 4	30M	30 M
6	Jl.Mr.Asaat (Terminal Kantin)	Roda 4 dan 6	24M	24M
7	Jl.M.Yamin (depan BANK BPD Syariah)	Roda 4	24 M	24 M
8	Komplek Pasar sayur	Roda 4 dan 6	21 M	20M

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, 2018

Lokasi parkir tidak mengalami penambahan walaupun volume kendaraan meningkat, dikarenakan kondisi kota dan pasar yang belum optimal

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya menurut indikator pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.19

Tabel 2.19
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target revisi Renstra OPD Tahun					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	SPM																		
1	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai (%)				65	75	75	75	80	60	70	75	75	80	92%	93%	100%	100%	100%
2	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai (%)				65	75	75	75	80	60	70	75	75	80	92%	93%	100%	100%	100%
3	SDM teknis yang mengikuti Bintek (orang)	- Tersedianya SDM Kompetensi perhubungan			10	15	15	15	10	10	8	8	8	5	100%	53%	53%	53%	50%
4	Terlaksananya sosialisasi aturan dibidang perhubungan pada masyarakat (orang)				180	180	180	180	180	150	160	150	160	160	83%	89%	83%	89%	89%
5	Tersedianya halte (unit)	- Tersedianya Halte			15	18	23	23	25	17	21	21	21	21	113%	117%	91%	91%	84%
6	Tersedianya rambu lalu lintas (buah)	-Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan			820	837	850	850	877	750	750	837	799	675	91%	90%	98%	94%	77%
7	Tersedianya APILL (unit)	-Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan			5	6	6	7	7	5	5	6	6	7	100%	83%	100%	86%	100%
8	Tersedianya perlengkapan lalu lintas (Road barrier, Traffic cone)	-Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (RoadBarrier)			25	25	95	95	95	25	25	95	150	103	100%	100%	100%	158%	108%
		-Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan(Traffic Cone)			25	25	70	70	70	20	25	60	60	70	80%	100%	86%	86%	100%
9	Tersedianya fasilitas keselamatan lalu lintas (m²)	Tersedianya Marka Jalan			1700	1200	900	450	2000	1606	1085	750	500	670,28	94%	90%	83%	111%	34%
10	Tersedianya angkutan umum yang berizin trayek pada jaringan transportasi jalan (km)	-Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan jalan			67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	100%
11	Terlaksananya perizinan angkutan umum (unit)	-Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan jalan			85	85	85	84	86	85	85	84	84	86	100%	100%	99%	100%	100%
12	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (unit)	- Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan bermotor			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian pada tahun kelima rata-rata memenuhi target dengan rasio capaian memuaskan. Target yang tidak tercapai hal ini dikarenakan penyesuaian kebutuhan atau ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi.

Uraian	Anggaran Tahun							Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
36 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan umum di Jalan Raya	305.920.000	256.250.000	161.420.000	352.705.000	387.920.000	279.118.400	157.595.800	151.060.200	256.327.600	381.742.960	91,24	61,50	93,58	72,67	98,41	18,81%	0,1		
37 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	62.335.000	76.815.000	48.900.000	24.000.000	16.750.000	45.834.900	71.506.059	27.069.460	23.996.186	6.866.800	73,53	93,09	55,36	99,98	41,00	-23,56%	-0,2		
38 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	28.015.000	23.510.000	5.300.000	56.340.000	30.887.500	24.885.800	21.478.860	4.687.000	36.324.200	21.250.750	88,83	91,36	88,43	64,47	68,80	206,08%	1,3		
39 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/juru mudik/Awak kendaraan angkutan	28.005.000	33.915.000	22.135.000	22.135.000	21.063.500	22.537.900	25.756.600	17.828.600	18.036.000	20.222.800	80,48	75,94	80,54	81,48	96,01	-4,62%	-0,0		
40 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	13.750.000	28.475.000	16.290.000	47.690.000	33.293.400	11.994.800	25.554.300	13.721.260	43.280.969	31.594.200	87,23	89,74	84,23	90,75	94,90	56,72%	0,6		
41 Penertiban dan Pengendalian Perizinan Angkutan Orang dan Barang	38.275.000	43.004.700	19.375.000	19.375.000	30.000.000	27.105.900	34.522.600	18.170.000	16.982.500	22.943.850	70,82	80,28	93,78	87,65	76,48	3,06%	0,0		
42 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	-	41.145.000	-	-	-	-	27.708.500	-	-	-	-	67,34	-	-	-	-25,00%	-0,2		
43 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0		
44 Kajian Penataan Jaringan Trayek Angkutan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0		
45 Optimalisasi fungsi terminal	-	78.800.000	-	-	-	-	67.066.500	-	-	-	-	85,11	-	-	-	-25,00%	-0,2		
IX Pembangunan Serana dan Prasarana Perhubungan																			
46 Pembangunan Gedung Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0		
47 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	194.255.000	130.155.000	-	-	-	165.429.000	127.554.000	-	-	-	-	85,16	98,00	-	-	-33,25%	-0,3		
X Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas																			
48 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	98.610.000	-	220.960.000	447.810.000	365.750.000	96.850.000	-	194.585.000	407.385.000	350.655.866	98,22	-	88,06	90,97	95,87	-3,91%	-0,0		
49 pengadaan sarana dan Prasarana Terminal	-	426.810.000	-	-	-	-	414.215.000	-	-	-	-	97,05	-	-	0,00	-25,00%	-0,2		
50 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	35.175.000	43.375.000	5.900.000	23.325.000	18.850.000	34.823.200	32.646.200	5.900.000	21.540.625	17.192.750	99,00	75,27	100,00	92,35	91,21	53,27%	0,3		
51 Dana Penunjang DAK	7.975.000	7.975.000	15.850.000	-	-	7.525.000	5.300.000	14.070.000	-	-	94,36	66,46	88,77	-	-	-0,31%	0,0		
52 Pengadaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat (DAK)	603.890.000	484.800.000	158.990.000	-	-	523.196.000	452.985.000	157.718.000	-	-	86,64	93,44	99,20	-	-	-46,73%	-0,4		
53 Pengadaan Marka	-	-	-	-	-	200.350.000	-	-	-	-	199.031.500	-	-	-	-	99,34	0,00%	0,0	
XI Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor																			
55 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	66.250.000	340.000.000	-	-	-	64.950.000	309.660.000	-	-	-	98,04	91,08	103,30%	0,94		
56 Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi PKB	-	-	-	-	70.000.000	-	-	-	-	69.900.000	-	-	-	-	99,86	0,00%	0,0		

Tabel diatas memaparkan anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Perhubungan periode 2013 sampai dengan 2018. Secara keseluruhan realisasi anggaran pada tahun kelima memenuhi capaian dari target yang telah ditentukan rata-rata capaian diatas 90%. Ada 3 (tiga) kegiatan yang tidak mencapai target yakni kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan realisasi 59,85%, kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan rutin rambu-rambu sebesar 43,86% dan kegiatan pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan sebesar 41,00%, hal disebabkan karena sesuai dengan kebutuhan sedangkan rehab rambu tidak mencapai realisasi yang tinggi karena terkendala pada bahan atau alat yang tidak memadai.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Hasil analis terhadap Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang serta hasil telaahan terhadap RTRW berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang seiring dengan penggunaan anggaran.

Tantangan

1. Sarana dan prasarana belum memadai (terminal, pangkalan truk, rambu, marka quadril, speeds bumps)
2. Pelayanan angkutan umum pada jaringan trayek yang masih rendah terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesat.
4. Fenomena berkembangnya angkutan online disaat pelayanan angkutan umum kurang optimal.
5. Pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru
6. Pengembangan Tarok City

Peluang

1. Rencana pengoperasian Pasar Pusat Kota Padang Panjang membutuhkan sarana dan fasilitas lalu lintas agar tercipta arus lalu lintas yang aman dan nyaman.
2. Pembangunan Islamic Center dan Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kota Padang Panjang, membutuhkan ketersediaan perlengakapan dan fasilitas transportasi darat
3. Pengembangan objek wisata, seperti Kubu Gadang dan Lubuk Mata Kucing memerlukan pengembangan dari sisi ketersediaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Luas wilayah kota yang tidak terlalu luas serta Padang Panjang sebagai kota perlintasan
5. Perencanaan pembangunan dan revitalisasi jalur Kereta Api.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka meningkatkan dan pengembangan pelayanan, maka Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang harus mengidentifikasi masalah yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Intenal	Eksternal	
Bidang Lalu Lintas					
Sumber Daya Manusia	Kuantitas : kurang Tenaga Lapangan, Tenaga Teknis/kompetensi (transportasi darat, PPNS) Kualitas : perlu Peningkatan	PP 51 Tahun 2012	- Penempatan pegawai sesuai kompetensi - Keterbatasan Anggaran	- Terkait Rekrutmen PNS formasi lulusan transportasi - Persetujuan Anggaran dari TAPD	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pelayanan LLAJ
Sarana dan Prasana lalu lintas	Kuantitas : kurang (Kendaraan roda 4 dan roda 2, APILL, Guadrail, RPPJ, Warning Light, traffict light, CCTV, road berrier, traffic cone dll) Kualitas : perlu Peningkatan baik pengadaan maupun pemeliharaan (CCTV + audio, speed bump/tanggul)	UU Nomor 22Tahun 2009	Keterbatasan Anggaran	- Usulan Musrenbang - Terkait persetujuan perencanaan dan anggaran	Masih rendahnya kinerja jaringan jalan
Peningkatan kesadaran berlalu lintas	Belum Optimalnya sosialisasi yang dilakukan	UU Nomor 22Tahun 2009	Terbatasnya Anggaran	Melibatkan pihak kepolisian dan dinas Pendidikan	Masih banyaknya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas
Regulasi	Payung pelaksanaan hukum tupoksi perhubungan	UU Nomor 22Tahun 2009	Belum lengkapnya payung hukum pelaksanaan tupoksi perhubungan	Terkait koordinasi dengan Bagian Hukum	Kurang kuatnya penegakan peraturan daerah
Bidang Angkutan dan Perpaketan					
SIM Perhubungan	Belum ada sistem informasi manajemen LLAJ	UU Nomor 22 Tahun 2009	Belum adanya kegiatan dan anggaran	Belum tersedianya infrastruktur pendukung	Belum tersedianya layanan Informasi dan data yang memadai
Moda angkutan	Load faktor angkutan umum rendah	PM Hub No. 189 Tahun 2015	Perlu kajian ulang moda transportasi	Koordinasi dengan stake holder terkait	Kurang populernya angkutan umum
Sarana angkutan ilegal	- Menjamurnya ojek pangkalan dan online	PM Hub No 23 Tahun 2018	Pendataan angkutan ilegal	Melibatkan Kepolisian untuk penertiban angkutan ilegal	Banyaknya angkutan ilegal

Perparkiran	Belum tersedianya fasilitas parkir yang memadai sesuai kebutuhan	UU Nomor 22 Tahun 2009	Ketersediaan lahan untuk fasilitas parkir	Perlu peningkatan Peran Swasta pemilik lahan	Masih menggunakan badan jalan dan masih banyaknya lokasi parkir liar
Terminal C	Masih belum tersedianya terminal angkutan umum yang representatif dan status lahan yang belum jelas	PM Hub No 79 Tahun 2018	Belum ada kajian terminal	Peran Pemerintah dalam optimalisasi terminal	Tidak terpelihara dan berfungsi Terminal C secara maksimal
Pangkalan Truck	Kurang memadainya fasilitas rest area/pangkalan truck	UU Nomor 22 Tahun 2009	Rehabilitasi rest area/pangkalan truk	Pengemudi Belum tertib dalam memanfaatkan rest area/pangkalan truk	Banyaknya pengemudi angkutan barang yang belum tertib
UPTD PKB					
Sumber Daya Manusia	Belum tersedianya pengujian sesuai kebutuhan	PM Hub No 133 Tahun 2015	jumlah pengujian sesuai kompetensi belum cukup	Belum optimalnya kerja sama dengan instansi terkait dan rekrutmen	Pelayanan kurang optimal
Sarana prasarana	Gedung uji	PM Hub No 33 Tahun 2018	- Perlu rehab gedung	Anggaran belum mandiri	pelayanan
	Gedung/ruang administrasi		- Masih satu atap dengan gedung pelayanan KIR	penganggaran	Ruang yang kurang representatif
SEKRETARIAT					
Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Sakip Masih CC	Permenpan 53 tahun 2014	Melakukan revisi dokumen perencanaan	Review dokumen perencanaan dari Inspektorat	Hasil evaluasi kinerja belum optimal

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Proses penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang di masa depan. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Telahaan atas visi, misi, dan program tersebut dirumuskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
**Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi : Untuk Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah Dan Bermartabat			
Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
MISI I : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kebutuhan anggaran biaya rutin 2. Kuantitas dan kualitas SDM yang kurang. 3. Kurangnya sarana dan prasarana keselamatan/infrastuktur terbatas 4. Belum Optimalnya pengendalian lalu lintas 5. Belum adanya SIM Lalin, SIM Angkutan 6. Pelayanan angkutan umum belum memadai serta Kepemilikan angkutan umum yang belum tertata dengan baik 7. Sarana dan Prasarana Terminal / pangkalan truck yang kurang representatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran 2. Kurang SDM teknis, perencanaan dan tenaga lapangan 3. Persetujuan perencanaan dan anggaran terkait infrastruktur 4. Masih banyak kecelakaan dan pelanggaran tertib lalu lintas 5. Masih adanya titik-titik penundaan jalan/Simpang/hari atau jam tertentu 6. Kurang optimalnya angkutan dalam mengoperasikan angkutan umum 7. kurangnya minat masyarakat menggunakan angkot 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya anggaran , Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang Lalu lintas 2. Penyediaan angkutan massal wajib diselenggarakan oleh Pemerintah 3. Kebijakan untuk meningkatkan pelayanan 4. Dukungan masyarakat dalam menjaga fasilitas sarana/prasarana umum terkait transportasi dan lalu lintas 5. Adanya dukungan dari pimpinan untuk peningkatan kualitas laporan kinerja dan keuangan 6. Pendampingan dari OPD yang berwenang memberikan pembinaan pada OPD lain 7. Kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik 8. Kebijakan tata ruang wilayah yang mendukung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang menyentuh pada Dinas Perhubungan untuk kurun lima tahun kedepan mempunyai sasaran agar meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan dan strategi dengan peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan dimana arah kebijakan terletak pada pembangunan struktur dengan kesesuaian tata ruang. Maka Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang menfokuskan program pembangunan pada :

1. Peningkatan Pelayanan Angkutan
2. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
3. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L dan RENSTRA KOTA atau RENSTRA PROPINSI

Tabel 3.3

Komparasi Visi dan Misi Renstra Kota Padang Panjang Terhadap Visi Misi Renstra Propinsi atau Renstra K/L

No	Visi Misi RPJMD Kota Padang Panjang	Visi Misi Renstra Dishub Propinsi Sumatera Barat	Visi Misi Kementerian/Lembaga
1.	Visi : Untuk Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah Dan Bermartabat	Visi : Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi Yang Handal Dan Terpadu	Visi : Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah
2.	Misi : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Misi : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pembangunan dan mengoptimalkan sarana prasarana Transportasi yang Berkelanjutan b. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan transportasi dengan meningkatkan Pelayanan, Fungsi Forum Koordinasi Lalu Lintas Angkutan & Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Transportasi 	Misi: <ul style="list-style-type: none"> a. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan b. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan; c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan; d. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah;

3.4 TELAAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Hasil telaahan terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis dan arah kebijakan ruang, menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang yang berada yang terletak pada titik silang arus lalu lintas, memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki potensi ekonomi, tidak saja berskala lokal maupun regional.

Beberapa potensi unggulan lokal Kota Padang Panjang antara lain sektor pariwisata, dan perdagangan serta sektor jasa. Adapun yang dimaksud dengan kajian lingkungan hidup strategis yaitu dampak yang signifikan dalam pembangunan yang terkait status lingkungan kota dan tatanan sosial budaya masyarakat, pemerintah daerah wajib menyusun kajian lingkungan hidup strtegis (KLHS) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Tujuan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis adalah mensinergikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan kota Padang Panjang dan menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai landasan penyusunan rencana, kebijakan dan program yang tertanam dalam RTRW Kota Padang Panjang.

Hasil analisis Tim KLHS dalam target capaian pembangunan berkelanjutan 2023 adalah persentase penggunaan moda transportasi umum di perkotaan. Dengan isu utama utama dan isu strategis KLHS 2018-2023 terkait Dinas Perhubungan seperti tabel 3.4

Tabel 3.4
Telaah Terhadap KLHS 2018-2023

Isu Utama	Isu Strategis	Skenario	Rekomendasi	Program Pendukung
Pencapaian TPB	Menjadikan Kota Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan • Jasa ekosistem Pemeliharaan kualitas udara kategori tinggi dan sangat tinggi 52,57%	Menaikkan persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 20,15% dari target nasional 32%	1. Penggunaan transportasi ramah lingkungan 2. Mendorong Penataan dan pembangunan sistem 3. Pengujian emisi gas buang berkala moda ransportasi 4. Memberikan rambu-rambu daerah rawan	1. Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum 2. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, terdapat sejumlah isu strategis sebagai entry point atas kebutuhan antisipasi, penanggulangan, maupun tindak lanjut yang perlu diupayakan. Kapasitas kelembagaan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang sejalan dengan terus bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Padang Panjang, perubahan terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dari permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah, Renstra K/L serta RTRW dan KLHS, memunculkan permasalahan-permasalahan pokok yang perlu penyelesaian dan solusi untuk maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu ditetapkan isu-isu strategis antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas dan layanan angkutan umum sebagai sarana angkutan massa;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas
3. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas
4. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor
5. Belum memadainya terminal dan pangkalan truk.
6. Sarana dan Prasarana lalu lintas yang rawan pencurian dan pengrusakan, sehingga perlu peningkatan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya sarana dan prasarana lalu lintas untuk keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dalam lima tahun mendatang dituangkan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Transis		Target Kinerja Sasaran pada tahun			
			i	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan		Percentase	n/a	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50
Kualitas		Kenaikan Indeks						
Infrastruktur		Kualitas layanan						
Perhubungan		infrastuktur						
berkelanjutan		perhubungan						
Meningkatn	a.	Jumlah angka	39	37	35	33	30	28
ya		kecelakaan						
Ketertiban								
Lalu Lintas								
Meningkatn	a.	Percentase						
ya		panjang trayek						
Pelayanan		jalan terlayani	27,02%	27,02%	27,02%	33,95%	33,95%	33,95%
Angkutan								
Jalan								
	b.	Percentase						
		kendaraan lulus uji Keur	97,14%	97,56%	97,91%	98,16%	98,86%	99,10%

Dalam rangka mewujudkan tujuan jangka menengah pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang memiliki 1 (satu) indikator tujuan yaitu Percentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan adalah indikator tujuan yang menghitung dan mengukur kenaikan kualitas layanan infrastruktur perhubungan dari tahun ke tahun.

Sedangkan untuk mewujudkan sasaran jangka menengah, Dinas Perhubungan mempunyai 3 (tiga) indikator sasaran sebagai berikut :

1. Jumlah angka kecelakaan yaitu jumlah kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Kota Padang Panjang tiap tahunnya dengan prediksi angka menurun, data didapat dari Kepolisian Kota Padang Panjang, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah angka kecelakaan} = \text{Jumlah kecelakaan pada tahun n}$$

Faktor pendukung turunnya angka kecelakaan adalah dengan memenuhi sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas, penyuluhan keselamatan lalu lintas serta pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

2. Persentase panjang trayek jalan terlayani adalah jumlah panjang jalan trayek perjumlah panjang jalan total dikali seratus persen, dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Panjang Trayek Jalan Terlayani} = \frac{\text{Jml panjang jalan trayek tahun n}}{\text{Jumlah total panjang jalan tahun n}} \times 100\%$$

Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 panjang trayek angkutan sepanjang 28,5 Km dari total panjang jalan 105,46 Km dan diperkirakan pada tahun 2021 ada penambahan panjang jalan trayek sepanjang 35,8 Km sehingga persentase panjang trayek jalan terlayani mengalami peningkatan menjadi 33,95%, dengan harapan penambahan panjang trayek angkutan umum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum.

3. Persentase kendaraan lolos uji Keur adalah jumlah kendaraan yang lolos keur tahun n perjumlah kendaraan pengujian tahun n dikali seratus persen, dengan formula sebagai berikut :

$$\% \text{ Kendaraan Lulus Uji Keur} = \frac{\text{Jml kendaraan lulus uji keur tahun n}}{\text{Jumlah taman kendaraan tahun n}} \times 100\%$$

Indikator sasaran ini menunjukkan sarana transportasi baik berupa angkutan barang maupun angkutan penumpang umum yang wajib uji dalam kondisi yang baik dan lulus dalam pengujian kendaraan bermotor, diharapkan untuk terus meningkat dalam mewujudkan keselamatan sarana tranportasi untuk keselamatan lalu lintas dijalan raya.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, sesuai dengan sasaran pada RPJMD 2018-2023 yang telah ditetapkan, dan arah kebijakan Perhubungan lima tahun mendatang yakni :

“Pemantapan pembangunan infrastruktur strategis yang bersih, indah, asri dan nyaman untuk mendukung produktifitas ekonomi”

Arah Kebijakan adalah petunjuk yang digunakan sebagai pemandu pelaksana agar strategi efektif dalam mewujudkan visi renstra. Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas
2. Mengadakan Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas
3. Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Angkutan Jalan
4. Mengadakan operasi penegakan hukum atas pelanggaran dokumen angkutan barang/orang

Sinergi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi Pembangun Kota Padang Panjang disektor perhubungan dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	: UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT			
MISI 1	: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI UNGGULAN DAERAH BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perhubungan berkelanjutan	Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas	Meningkatkan Sarana Prasarana lalu lintas, Pengamanan dan Pengendalian lalu lintas	1. Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas 2. Mengadakan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	
	Meningkatkan Pelayanan Angkutan Jalan yg aman dan nyaman	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pelayanan angkutan,	1. Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Angkutan Jalan 2. Mengadakan operasi penegakan hukum atas pelanggaran dokumen angkutan barang/orang	

Sesuai dengan tujuan RPJMD 2018-2023 meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan melalui strategi peningkatan infrastruktur berkelanjutan dengan arah kebijakan pemantapan pembangunan infrastruktur strategis kota yang bersih, indah, asri dan nyaman untuk mendukung produktivitas ekonomi melalui program peningkatan pelayanan angkutan dengan indikator persentase layanan angkutan kota dengan produk unggulan pengadaan sarana smart transportation (Smart Bus).

Terkait dengan program unggulan tersebut bahwasanya tahun 2019 akan dilaksanakan kajian transportasi layak, dimana diharapkan akan didapat karakteristik angkutan umum yang sesuai dengan Kota Padang panjang beserta kebutuhan dan perlengkapannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai salah satu program unggulan maka “Smart Bus” ini nantinya akan mempunyai bentuk seperti layaknya angkutan massal perkotaan dengan disain kendaraan yang ramah disabilitas dan terintegrasi dengan halte yang juga mempertimbangkan kemudahan bagi difable dalam beraktivitas serta menggunakan teknologi GPS (Bus Tracking) dan papan informasi digital yang memuat rute serta jadwal pelayanan angkutan umum. Hal ini diharapkan masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan angkutan umum yang berbasis pada keamanan, keselamatan, keterjaminan yang berkeselarasan.

Dan untuk menunjang program smart transportation, perlu juga didukung dengan program smart traffic, dimana pada lintasan/rute yang dilalui nantinya akan dilengkapi dengan perlengkapan lalu lintas yang berbasis teknologi informasi seperti traffic light, warning light maupun CCTV yang akan dilengkapi dengan audio dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi area traffic control system (ATCS) sehingga dapat bersinergi dengan kelancaran smart transportation dalam operasional nantinya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 dituangkan kedalam 8 program diantara 3 program urusan Perhubungan. Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan yang telah disusun untuk Rencana Pembangunan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja dari masing-masing program,seperti dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini :

RENSTRA OPD KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERHUBUNGAN
PERIODE 2018-2023

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tujuan 1	Meningkatkan kualitas infrastruktur Perhubungan berkelanjutan	Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	(%)	0,50		0,75		1,00		1,25		1,50		1,50	
Sasaran 1	Meningkatnya Keterlibatan Lalu Lintas	Jumlah angka kecelakaan	39 (Angka)	37		35		33		30		28		28	
1-15-19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase perlengkapan Fasilitas Keselamatan yang berkualitas	80,16 (%)	80,40	588.750.000	81,98	1.064.020.000	83,03	2.931.520.000	83,73	1.774.020.000	84,78	2.161.520.000	84,78	8.529.830.00
1-15-19-01	Kegiatan Pengadaan Tanggul/ Speed Bump	Jumlah speed bumps yang terpasang	208 set (Unit)	208 set	115.950.000	-	0	-	0	-	0	-	0	115.950.00	
1-15-19-02	Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu-rambu yang diadakan	4 jenis (675 unit rambu, 28 cermin tikung, 103 unit road barrier, 70 unit traffic cone) (Jenis)	3 jenis (28 unit rambu, 2 rppj, 5 cermin tikung)	117.100.000	-	0	-	0	-	0	-	0	117.100.00	
1-15-19-03	Kegiatan Pengadaan Marka Lalu Lintas	Volume marka lalu lintas dan zoss yang terpasang	670,28 m (m3)	750 m3	182.850.000	800 m3	180.000.000	800 m3	200.000.000	800 m3	200.000.000	800 m3	200.000.000	4.620,28 m3	962.850.00
1-15-19-04	Kegiatan Pengadaan Guard Rail Lalu Lintas	Jumlah guardrail yang terpasang	986 (Meter)	100	182.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	182.850.00
1-15-19-09	Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung, Terminal	Jumlah halte dan gedung, terminal	21 unit (Unit)		0		0	1 unit	500.000.000		0		0	22 unit halte, 2 gedung dan 1 terminal	500.000.00
1-15-19-13	Kegiatan Dana Penunjang DAK	Jumlah kegiatan	(Kegiatan)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
1-15-19-14	Kegiatan Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas (DAK)	Jumlah jenis fasilitas keselamatan	(Jenis)	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	
1-15-19-15	Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah pertemuan Forum LLAJ	3 Kali (Kali)	-	0	3 kali	18.500.000	3 kali	18.849.800	3 kali	15.000.000	3 kali	15.000.000	18 Kali	67.349.80
1-15-19-16	Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Rambu-Rambu, Traffic, Warning Light, Marka Jalan dan Halte	Jumlah jenis sarana prasarana keselamatan lalu lintas	5 (Jenis)	0	0	5	90.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	390.000.00
1-15-19-18	Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Jumlah peserta pelajar yang mengikuti seleksi	25 orang (Orang)	-	0	25 orang	54.780.000	25 orang	54.000.000	25 orang	54.000.000	25 orang	54.000.000	150 orang	216.780.00
1-15-19-19	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan dijalan raya	(Kegiatan)		0	3 kegiatan	402.740.000	3 kegiatan	408.670.200	3 kegiatan	400.020.000	3 kegiatan	405.000.000	3 kegiatan	1.616.430.20

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
(1)	(2)	(3)	(4)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1-15-19-22	Pengadaan Alat Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Jenis alat pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1 Jenis (996 m guadral, 28 cermin tikung) (Jenis)	-	0	1 Jenis (4 titik speed bumps+ 1 paket guadral)	90.000.000	3 Jenis (150 m/ 1 paket guadral, 3 titik speed bumps, 5 cermin tikung)	350.000.000	1 Jenis (3 Titik speed bumps + 1 paket guadral)	105.000.000	3 Jenis (150 m/ 1 paket guadral)	355.000.000	3 Jenis (1656 m guadral, 23 titik speed bumps, 38 cermin tikung)	900.000.00
1-15-19-23	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Keselamatan	Jumlah jenis alat pemberi syarat lalu lintas (warning light, Traffic light, CCTV)	3 Jenis (25 unit warning light, 7 unit traffic light, 3 unit CCTV (Dokumen))	-	0	1 Dokumen	78.000.000	jenis 2 lokasi warning light, 1 lokasi traffic light, 7 titik CCTV (audio + ED+NVR)	1.200.000.000	Jenis 4 lokasi warning light, 7 Titik CCTV (audio+LED+N VR)	750.000.000	2 Jenis 1 lokasi traffic light, 3 titik CCTV (audio+NVR+PC+UPS+ACCU+LED)	900.000.000	3 Jenis (25 unit warning light, 7 unit traffic light, 3 unit CCTV)	2.928.000.00
1-15-19-24	Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu dan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah jenis rambu-rambu dan fasilitas keselamatan lalu lintas	4 jenis (675 unit, 28 unit cerminlikung, 103 unit road berrier, 70 unit traffic cone) (Jenis)	-	0	2 Jenis (50 rambu, 50 traffic light)	150.000.000	2 Jenis (50 rambu, 50 road berrier)	100.000.000	2 Jenis (50 rambu, 50 traffic cone)	150.000.000	4 Jenis (905 rambu, 28 cerminlikung, 203 road berrier, 170 traffic cone)	132.520.000	4 jenis (905 unit, 28 unit cerminlikung, 203 unit road berrier, 170 unit traffic cone)	532.520.00
Sasaran 2	Meningkatkan pelayanan angkutan jalan yang aman dan nyaman	Presentase panjang trayek terlayani	27,02 (%)	27,02	27,02	33,95	33,95	98,16	98,86	99,10	99,10	99,10	99,10	99,10	99,10
		Persentase kendaraan lulus uji keur	97,14 (%)	97,56											
1-15-15	Program pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas LLAJ yang layak	80 (%)	80	216.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80	216.600.00
1-15-15-03	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Jumlah kegiatan pengelolaan terminal/pangkalan	3 (Kegiatan)	3	215.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	215.600.00
1-15-16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	90 (%)	90	202.730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90	202.730.00
1-15-16-18	Rehabilitasi/ Perbaikan Sarana Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	10 (Unit)	10	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10	70.000.00
1-15-16-19	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Rambu-Rambu, Traffic Warning Light, Marka Jalan dan Halte	Jumlah jenis sarana prasarana keselamatan lalu lintas yang dipelihara	5 (Jenis)	5	132.730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5	132.730.00
1-15-17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Layanan Angkutan	0,0148 (%)	0,0145	826.719.500	0,0142	672.600.000	0,0138	1.622.600.000	0,0136	1.922.600.000	0,133	622.600.000	0,133	5.666.119.50
1-15-17-05	Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	10 (Buku)	10	20.369.800	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20.369.80
1-15-17-06	Sosialisasi/Penyaluhan Keterlibatan Lalu Lintas dan Angkutan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	140 (Orang)	80	34.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80	34.350.00

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1-15-17-07	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Jumlah pengemudi yang mengikuti pemilihan AKUT	25 (Orang)	25	24.575.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	125	124.575.000	
1-15-17-08	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	Jumlah tenaga parkir	8 (Orang)	8	242.480.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	350.000.000	0	300.000.000	8	1.492.480.000	
		Jumlah Lokasi Parkir	(Lokasi)	0		8		8		15		15		15	8	
		Jumlah razia peneritiban parkir	(hari)	0		15		15		3		3		3	60	
		Jumlah angkutan mudik	(Unit)	0		3		3							12	
1-15-17-09	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah upah tenaga harian lepas dan makan minum harian	10 (Orang)	11	399.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	399.020.000
1-15-17-10	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Jumlah peserta pelajar yang mengikuti seleksi	25 (Orang)	25	56.074.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	56.074.900
1-15-17-11	Kegiatan Peneritian dan Pengendalian Perzinan Angkutan Orang dan Barang	Jumlah hari razia peneritiban	15 (hari)	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	75	150.000.000	
1-15-17-12	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah pertemuan forum LLAJ	3 (Kali)	3	18.849.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18.849.800
1-15-17-13	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Jumlah kegiatan pengelolaan terminal/pangkalan	(Kegiatan)	0	0	3	215.600.000	3	215.600.000	3	215.600.000	3	215.600.000	12	862.400.000	
1-15-17-14	Kegiatan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah pertemuan stakeholder dengan mitra angkutan	(Kali)	0	0	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	16	120.000.000	
1-15-17-15	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Angkutan Umum	Jumlah smart bus, halte yang diadakan	1 (Unit)	0	0	0	0	1	1.000.000.000	0	0	0	0	1	1.000.000.000	
1-15-17-16	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan(Pangkalan Angkutan Barang)	Jumlah pangkalan angkutan barang yang dipelihara	(Unit)	0	0	0	0	0	0	0	1.222.000.000	0	0	1	1.222.000.000	
1-15-17-17	Naskah Akademik Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Transportasi Darat)	Jumlah Ranperda dan Ranperwako bidang perhubungan	(Dokumen)	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000
1-15-17-18	Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base Perhubungan	Jumlah dokumen yang disusun	(Buku)	0	0	10	22.000.000	10	22.000.000	10	50.000.000	10	22.000.000	40	116.000.000	
1-15-20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	91,69 (%)	93,40	0	94,71	320.000.000	96,01	370.000.000	96,64	70.000.000	96,64	70.000.000	96,64	830.000.000	
1-15-20-01	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi PKB	Jumlah alat penunjang SIM pengujian kendaraan bermotor	2 (Jenis)	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3	150.000.000
1-15-20-02	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan ber4motor yang dipelihara	10 (Unit)	0	0	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	48	280.000.000	
1-15-20-03	Kegiatan Pembangunan Gedung Administrasi/PKB (DAK)	Jumlah gedung	(Unit)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1-15-20-04	Kegiatan Dana Penunjang DAK	Jumlah kegiatan	(Kegiatan)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1-15-20-05	Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat penunjang pengujian kendaraan bermotor	12 (Unit)	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	13	300.000.000
1-15-20-06	Kegiatan Pelaksanaan ISO	Jumlah sertifikat	(Sertifikat)	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
0-00-01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	90 (%)	90	1.145.695.000	90	1.075.804.500	90	1.362.752.000	90	1.146.669.000	90	1.146.115.000	90	5.877.035.50
0-00-01-01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan	400 (Jenis)	400	1.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800	1.740.00
0-00-01-02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	3 (Rekening)	3	52.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	52.200.00
0-00-01-03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	15 (Unit)	15	328.665.000	15	295.798.500	15	415.725.000	15	328.665.000	21	328.665.000	21	1.697.518.50
0-00-01-04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	2 (Gedung)	2	235.860.000	2	235.860.000	2	247.653.000	2	235.860.000	2	235.860.000	2	1.191.093.00
0-00-01-05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	25 (Jenis)	25	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50	13.000.00
0-00-01-06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 (Jenis)	2	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	60.000.00
0-00-01-07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	680 (Ok)	555	19.980.000	525	17.982.000	550	22.050.000	500	19.980.000	500	19.980.000	3496	99.972.00
0-00-01-08	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	50 (Ok)	50	287.000.000	50	258.300.000	50	330.000.000	50	287.000.000	50	287.000.000	250	1.449.300.00
0-00-01-09	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kantor	Jumlah tenaga administrasi/ teknis perkantoran	2 (Orang)	4	134.250.000	4	134.250.000	4	162.000.000	4	134.250.000	4	134.250.000	4	699.000.00
0-00-01-11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	15 (Jenis)	10	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25	13.000.00
0-00-01-16	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah hari lembur	(hari)	0	0	0	0	100	30.000.000	0	0	0	0	100	30.000.00
0-00-01-18	Pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat	Jumlah jenis cetak / penggandaan dokumen, ATK dan Jasa surat menyurat	(Jenis)	0	0	4	69.714.000	4	83.424.000	4	75.714.000	4	75.160.000	4	304.012.00
0-00-01-19	Kegiatan Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi	Jumlah jenis komponen	(Jenis)	0	0	15	63.900.000	15	71.900.000	15	65.200.000	15	65.200.000	15	266.200.00
		Jumlah tagihan rekening yang dibayar	(Rekening)	0	3			3		3		3		3	
0-00-02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 (%)	90	23.791.000	90	592.791.000	90	373.791.000	90	414.791.000	90	578.791.000	90	1.983.955.00
0-00-02-02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan yang diadakan	(Jenis)	0	0	0	0	0	0	7	116.000.000	0	0	7	116.000.00
0-00-02-05	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	(Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	450.000.000	6	450.000.00
0-00-02-06	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang / berat	1 (Gedung)	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	0	0	0	0	1	600.000.00
0-00-02-10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor	Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara	12 (Unit)	12	23.791.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	23.791.00
0-00-02-23	Pengadaan Alat-Alat Kantor	Jumlah alat-alat kantor yang diadakan	17 (Jenis)	0	0	2	17.000.000	0	0	3	100.000.000	2	55.000.000	7	172.000.00
0-00-02-31	Pengadaan Pakaiian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah pakaiian dinas dan perlengkapan yang diadakan	27 (Stel)	0	0	56	155.000.000	0	0	56	125.000.000	0	0	112	280.000.00
		Jumlah pakaiian kerja lapangan	(Stel)	0	30			0		30		0		60	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah pakaihan olah raga dan baju kaos dishub	(Stel)	0		130		0		130		0		260	
0-00-02-32	Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit gedung dan perlengkapan kantor yang dijaga dan dibersihkan	(Gedung)	0	0	2	120.791.000	2	73.791.000	2	73.791.000	2	73.791.000	2	342.164.00
0-00-05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	18 (%)	18	50.000.000	18	98.000.000	18	60.000.000	18	60.000.000	18	60.000.000	18	325.000.00
0-00-05-05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatatur yang mengikuti Bintek	10 (Ok)	10	50.000.000	0	95.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	10	325.000.00
0-00-06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 (%)	100	974.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	974.00
0-00-06-01	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan laporan kinerja yang disusun	12 (Laporan)	5	674.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5	674.00
0-00-06-02	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan kinerja yang disusun	2 (Laporan)	3	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	300.00
					3.063.259.500		3.820.215.500		6.720.663.000		5.388.080.000		4.639.026.000		23.631.244.00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang untuk periode 2018-2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sesuai dengan sasaran RPJMD yang salah satunya adalah meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang menjadi tujuan perangkat daerah yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur perhubungan berkelanjutan dengan indikator yang terukur.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Perhubungan menetapkan indikator kinerja sasaran yang mengacu pada indikator tujuan dan sasaran Renstra OPD sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Transisi	Target Kinerja Sasaran pada tahun					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perhubungan berkelanjutan			Percentase Kenaikan Indek Kualitas layanan infrastuktur perhubungan	n/a	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	
	Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas		Jumlah angka kecelakaan		39	37	35	33	30	28
	c. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	-	Percentase Rata-rata Fasilitas Keselamatan	80,15%	80,40%	81,98%	83,08%	83,73%	84,78%	
	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Jalan		Percentase panjang trayek jalan terlayani	27,02%	27,02%	27,02%	33,95%	33,95%	33,95%	
	a. Peningkatan Pelayanan Angkutan	-	Percentase Layanan Angkutan	0,0148%	0,0145%	0,0142%	0,0138%	0,0136%	0,0133%	
		-	Percentase kendaraan lulus uji Keur	97,14%	97,56%	97,91%	98,16%	98,86%	99,10%	
	b. Peningkatan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Kelaikan	Percentase kepemilikan keur angkutan umum	91,69	93,40%	94,71%	95,36%	96,01%	96,64%	

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang maka didukung oleh program-program yang memiliki indikator terukur sehingga target-target yang akan dicapai dapat diupayakan maksimal melalui kegiatan-kegiatan pada bidang urusan perhubungan berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2019.

Adapun Program-program dan indikator kinerja penyelenggaran urusan bidang perhubungan sebagai berikut :

1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas diakomodir oleh Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana lalulintas demi mewujudkan keselamatan, kelancaran, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Indikator program ini adalah persentase fasilitas keselamatan, dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\% \text{ Fasilitas Keselamatan lalu lintas yang berkualitas}}{\% \text{ Fasilitas Keselamatan lalu lintas yang berkualitas}} = \frac{\text{Persentase fasilitas keselamatan tahun n}}{\text{Jumlah Jenis faskes tahun n}} \times 100\%$$

Indikator ini menunjukkan persentase ketersediaan serta kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas yang terpasang di Kota Padang Panjang.

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program peningkatan pelayanan angkutan adalah program yang diakomodir oleh Bidang Angkutan bergerak dalam hal optimalisasi layanan publik terkait angkutan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang. Indikator program ada 2 (dua) bagian yaitu :

a. Persentase Layanan Angkutan, adalah jumlah angkutan kota yang beroperasi dibanding jumlah penumpang yang menggunakan angkutan kota, dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Layanan Angkutan} = \frac{\text{Jml angkutan kota tahun n}}{\text{Jumlah penumpang angkutan kota tahun n}} \times 100\%$$

Indikator ini menunjukkan optimalisasi angkutan kota yang beroperasi dengan melihat jumlah masyarakat yang menggunakan jasa angkutan kota dalam pemenuhan kebutuhan transportasi di Kota Padang Panjang.

b. Persentase Kepemilikan Keur Angkutan Umum, adalah jumlah angkutan umum yang memiliki keur dibanding jumlah angkutan umum yang terdaftar untuk melakukan keur, dengan formula sebagai berikut :

$$\% \text{ Kepemilikan Keur} = \frac{\text{Jml angkutan umum yang keur tahun n}}{\text{Jumlah angkutan umum tahun n}} \times 100\%$$

Indikator ini menunjukkan tingkat laik jalan kendaraan angkutan umum yang wajib keur secara berkala.

BAB VIII

P E N U T U P

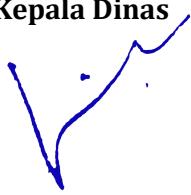
Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 yang membuat tujuan, sasaran, dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 yang digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang dituangkan dalam Renstra ini diharapkan dapat menggali sumber daya yang ada agar dapat bersama menggerakkan apa yang menjadi tujuan dan komitmen dalam mencapai kesepakatan ini. Untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan konsolidasi intenal agar timbul persamaan persepsi dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Rencana Strategis ini diharapkan mampu menjawab persoalan dan permasalahan yang dihadapi atau mungkin muncul dikemudian hari. Oleh karenanya semua jajaran komitmen dan satu hati dalam menjunjung tujuan akhir yakni untuk Kota Padang Panjang Bermarwah dan Bermartabat.

Padang Panjang, 2019

Kepala Dinas


I PUTU VENDA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770522 199511 1 001